

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rohingya adalah kaum minoritas Muslim yang menggunakan bahasa Indo-Eropa yang mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine Utara, sebuah desa pesisir di Myanmar. Menurut Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Khin Yi, ada sekitar 1,33 juta orang Rohingya di negaranya. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara atau kelompok etnis mereka. Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, dimana etnis Rohingya sendiri sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine merupakan etnis mayoritas yang mayoritasnya merupakan penganut Buddha. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas masih dianggap ilegal oleh pemerintahan Myanmar (Waluyo, 2013, p. 838).

Selama beberapa dekade etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi hukum dan sosial. Undang-Undang Kewarganegaraan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar pada tahun 1982 melepaskan Rohingya dari kewarganegaraan mereka (European Commission, 2018, p. 2). Banyaknya diskriminasi terhadap etnis Rohingya membuat mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang layak di Myanmar, seperti layaknya warga negara Myanmar. Etnis Rohingya harus tunduk pada banyaknya batasan yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar dalam kehidupan sehari-hari mereka, dimana mereka dilarang bepergian tanpa izin dan dilarang bekerja di luar desa mereka, mereka juga tidak dapat menikah tanpa izin dan, karena adanya pembatasan gerak, mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap peluang pekerjaan, perawatan medis dan pendidikan. Pemerintah Myanmar sendiri tidak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya karena etnis Rohingya dianggap bukan merupakan etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan negara Myanmar pada tahun

1948. Selain itu, adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya, membuat mereka beranggapan bahwa meningkatnya populasi etnis Rohingya akan mengurangi hak etnis Rakhine terhadap lahan dan perekonomian, terlebih di wilayah Rakhine yang merupakan pusat dari kehidupan etnis Rohingya (Waluyo, 2013, pp. 838-839).

Banyak tindakan kekerasan maupun tindak diskriminasi lainnya yang dilakukan kepada etnis Rohingya, seperti pembakaran pemukiman, pembunuhan, pemerkosaan, dsb. Tindakan diskriminasi tersebut membuat banyak etnis Rohingya yang mengungsi ke berbagai wilayah, salah satunya adalah ke Bangladesh. Seperti pada 9 oktober 2016 terjadi serangkaian insiden kekerasan dan operasi militer yang dilakukan oleh aparat karena adanya serangan yang di duga dilakukan oleh ratusan etnis Rohingya yang menyebabkan 9 aparat tewas, dan sebanyak 8 anggota penyerangan tewas dibunuh oleh aparat (Wijaya, 2016). Lebih dari 87.000 orang Rohingya menuju ke negara Bangladesh untuk berlindung. Bahkan hingga 25 agustus 2017, ada sekitar 655.500 pengungsi Rohingya yang telah melintasi perbatasan Bangladesh untuk mengungsi dikarenakan serangan yang telah dilakukan sebelumnya (European Commission, 2018, p. 4).

Bangladesh sendiri adalah negara yang miskin dan padat penduduk. Bangladesh merupakan salah satu negara yang menghadapi kemiskinan di mana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran di negara tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan data dari World Bank yang menunjukkan bahwa 40% dari populasi penduduk Bangladesh berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Bangladesh disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi instabilitas politik, bencana alam, minimnya fasilitas umum, dan permasalahan ekonomi (WorldBank, 2018)

Masuknya pengungsi dari Rohingya ke Bangladesh menyebabkan dampak yang negatif terhadap warga lokal, selain itu kedatangan banyak pengungsi dari etnis Rohingya ke Bangladesh tidak menjadi isu kemanusiaan saja bagi

Bangladesh, tetapi juga merupakan sebuah potensi yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri Bangladesh sendiri. Hal ini dikarenakan selama beberapa dekade negara Bangladesh menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan etnis Rohingya untuk mengungsi yang disebabkan jaraknegaranya yang dekat dengan Myanmar (Mery & Olivia, 2015, pp. 1194-1196).

Bangladesh yang merupakan negara miskin yang padat penduduk menjadikan pengungsi dari Rohingnya menjadi beban yang berat bagi perekonomian Bangladesh (Mubyarto, 2004). Selain menjadi beban bagi perekonomian Bangladesh, kedatangan para pengungsi Rohingya juga menjadi isu keamanan bagi negara Bangladesh karena ada sekitar 163 juta jiwa jumlah penduduk pada tahun 2016 di negara yang luas wilayahnya hanya 147.570 km<sup>2</sup>. Hingga desember 2017, diperkirakan ada sekitar 650.000 pengungsi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar untuk menuju ke Cox's Bazar, Bangladesh sejak akhir agustus 2017 (UNHCR, 2017).

Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh membuat pemerintah Bangladesh kesulitan untuk menangani para pengungsi, hal ini dapat dilihat dari buruknya fasilitas kamp-kamp pengungsian bagi pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Keadaan ini membuat pemerintah Bangladesh mulai menolak pengungsi dari Rohingya untuk masuk ke Bangladesh. Hal ini membuat berbagai sikap dari beberapa negara atas keadaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya, salah satunya adalah Turki.

Turki sendiri merupakan negara besar yang terletak di kawasan Eurasia yang beribukotakan Ancara, namun kota terpenting dan terbesar di Turki adalah Istanbul dikarenakan oleh letaknya yang strategis yang berada diantara benua asia dan benua eropa. Turki merupakan negara maju, baik dari aspek perekonomian maupun aspek lainnya. Kemajuan Turki yang cukup pesat saat ini tidak lepas dari peran Erdogan, dimulai ketika ia masih menjabat sebagai perdana menteri Turki selama dua periode hingga pada tahun 2014 ia mencalonkan diri

menjadi presiden Turki, dan pada 10 Agustus 2014 ia terpilih sebagai presiden Turki (Junaidi, 2016, pp. 5-6). Turki pada masa kepemimpinan Erdogan sukses secara ekonomi dan bidang-bidang lain sehingga Turki semakin disegani di Eropa atau menjadi rujukan bagi dunia Islam lain (NU, 2016).

Turki pada masa kepemimpinan Erdogan memang dikenal aktif dalam membantu menangani isu-isu kemanusiaan, dimana peran Turki dalam membantu mengatasi permasalahan kemanusiaan ini bukan hanya dilakukan kepada etnis Rohingya saja, tetapi di berbagai negara lain seperti di Palestina dan negara lainnya. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zenny Fitriana Fermalasari yang berjudul Keterlibatan Turki Dalam Konflik Xinjiang Tahun 2009.

Dimana pada penelitian itu disebutkan bahwa Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur dan banyaknya korban yang jatuh dalam konflik Xinjiang memunculkan reaksi dari publik dan pemerintahan Turki, seperti Protes yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Industri Turki Nihat Ergun yang menyerukan boikot terhadap semua produk yang berasal dari Tiongkok dan Erdogan yang juga ikut menyatakan dukungannya terhadap demo anti Tiongkok yang dilaksanakan di depan kedutaan Besar Tiongkok di Ankara dengan memprotes tindakan pemerintah Tiongkok sebagai suatu bentuk genosida dan mengkritik sikap pemerintah Tiongkok yang tidak terlalu bereaksi terhadap konflik Xinjiang (Fermalasari, 2015)

Sedangkan dalam menanggapi kasus krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menteri luar negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu meminta Bangladesh untuk membuka pintu kepada pengungsi Rohingya yang ingin masuk ke Bangladesh. Turki melalui Mevlüt Çavuşoğlu menyatakan akan menanggung semua biaya untuk pengungsi Rohingya apabila Bangladesh bersedia untuk menerima pengungsi Rohingya kembali (Novia & Murdaningsih, 2017). Selain mencoba bernegosiasi dengan pemerintah Bangladesh agar Bangladesh bersedia untuk membuka pintu terhadap pengungsi Rohingya, Turki juga

banyak memberikan bantuan terhadap pengungsi rohingya, baik bantuan kemanusiaan ataupun bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pengungsi, seperti makanan, obat-obatan, dsb. Presiden Erdogan juga mengkritisi banyaknya negara yang tidak peduli terhadap kondisi pengungsi etnis Rohingya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut: “Mengapa Turki Aktif Dalam Membantu Pengungsi Rohingya di Bangladesh?”

## **C. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan dibahas, hal ini agar memudahkan penulis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat sehingga hasil penulisan bisa lebih jelas dan maksimal. Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Pengungsi Rohingya di Bangladesh” ini dibatasi dengan menggunakan jangkauan waktu sejak tahun **2016 hingga tahun 2017**.

Dipilihnya tahun 2016-2017 oleh penulis karena maraknya kekerasan di Rakhine pada tahun tersebut. Sehingga menyebabkan banyak etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri mereka, bahkan hingga desember 2017, diperkirakan ada sekitar 650.000 pengungsi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar untuk menuju ke Cox’s Bazar, Bangladesh (UNHCR, 2017). Yang mana hal ini berdampak pada banyaknya jumlah pengungsi di Bangladesh dan hal ini mendapat perhatian khusus dari Turki dalam bagaimana menangani permasalahan tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Turki begitu aktif dalam membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan pengungsi Rohingya di Bangladesh.
3. Untuk mengetahui bantuan-bantuan yang diberikan oleh Turki kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengalaman penulis dalam meneliti suatu kasus di dalam kajian ilmu hubungan internasional
2. Sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu hubungan internasional serta menambah kajian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kasus imigran.
3. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Indonesia, khususnya apabila menghadapi kasus yang serupa dengan penelitian ini.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Uraian diatas, kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam masalah ini ialah: Konsep Hak Asasi Manusia dan Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri.

##### **1. Konsep Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)**

Mengutip dari buku *Theories of International Relations*, Scott Burchill yang mengemukakan bahwa ide dari hak asasi manusia secara universal berasal dari tradisi Hukum Alam, dalam perdebatan di Barat tentang pencerahan 'hak manusia' dan dalam pengalaman individu yang berjuang melawan aturan negara yang sewenang-wenang. Manusia dikatakan diberkahi, hal ini murni dengan alasan kemanusiaan, dengan hak-hak fundamental, manfaat dan perlindungan tertentu. Hak-hak ini

dianggap inheren karena mereka tidak dapat dilepaskan atau diambil dan bersifat universal karena Hak kemanusiaan itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, status, jenis kelamin atau ras mereka (Burcill & Linklater, 2005, p. 67).

Isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dari komitmen negara-negara untuk mengimplementasikan hak-hak dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Komitmen tersebut dapat dilihat dari aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang terwujud dalam norma atau aturan kemasyarakatan, baik aturan hukum (Konstitusi beserta penjabarannya dalam perundang-undangan nasional) ataupun aturan kelembagaan pendukungnya, dalam hal ini termasuk perlindungan HAM. Peran masyarakat dan mekanisme bekerjanya aturan-aturan tersebut dalam mewujudkan tuntutan HAM di dalam kehidupan sosial-politik di suatu negara harus sesuai dengan kesepakatan dan standar baku masyarakat internasional yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional (Neta, 2013).

HAM merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara berupa perlindungan hukum dengan hak asasi disetiap manusia dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Konsep HAM yang seringkali diidentikkan dengan kebebasan dalam berbagai dimensi tentunya tidak lepas dari kontribusi pemikiran Liberal di dalamnya. Perluasan hak-hak tersebut bagi semua manusia memiliki tempat yang sangat penting di dalam pemikiran liberal tentang kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, dikarenakan oleh dua alasan. Pertama, hak-hak ini memberikan landasan hukum bagi emansipasi, keadilan, dan kebebasan manusia. Penolakan suatu etnis, kelompok atau manusia oleh otoritas negara adalah penghinaan terhadap martabat semua manusia. Kedua, negara-negara yang memperlakukan warganya sendiri secara etis dan membiarkan mereka berpartisipasi dalam proses politik dianggap tidak terlalu berperilaku agresif secara internasional. Kaum liberal umumnya memiliki pandangan yang positif

mengenai sifat manusia. Mereka meyakini bahwa setiap individu memiliki kepentingan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi kaum liberal juga meyakini bahwa individu dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional (Jackson & Sorensen, 2013, p. 175).

Selain itu Dalam laporannya, Vincent (1986) mengidentifikasi hak individu sebagai satu-satunya hak asasi manusia yang berkemungkinan mendapatkan dukungan oleh konsensus global dan komunitas dunia, terlepas dari perbedaan agama atau ideologi (Burdick & Linklater, 2005, p. 68). Sehingga individu atau kelompok yang mengalami kejahatan Hak Asasi Manusia berhak untuk di dukung oleh negara ataupun komunitas dunia.

Mekanisme komunitas internasional untuk menjamin hak asasi manusia di suatu negara baru akan terlibat apabila sistem perlindungan di dalam negara itu goyah atau bahkan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional dapat memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan atau tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik itu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM kepada individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang (Siregar, 2014, p. 2).

Dengan demikian, jelas adanya bahwa masalah kemanusiaan ini juga merupakan tanggungjawab Turki dan juga seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan. Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan Turki dalam krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah bentuk dukungan Turki terhadap Hak Asasi pengungsi Rohingya dan dapat dikaitkan sebagai respon suatu negara terhadap penindasan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dimana Turki meminta Bangladesh untuk menerima kembali pengungsi Rohingya agar dapat memasuki wilayah Bangladesh. Selain itu,



Turki juga bersedia untuk menanggung biaya dan juga memberikan banyak bantuan yang diperlukan para pengungsi Rohingya (Muhaimin, 2017). Hal tersebut sesuai dalam mukadimah deklarasi HAM tahun 1948 yang menyatakan bahwa negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **2. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**

Secara umum, analisis kebijakan luar negeri mempunyai empat dasar yang menjadi ciri khas. Pertama, merupakan teori yang bisa menerima banyak faktor. Kedua, bisa menerima dan menggunakan lebih dari satu variabel. Ketiga, analisisnya dapat dipandang lebih fleksibel. Hal ini karena dalam menjelaskan atau menganalisis sebuah kebijakan luar negeri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain sebagainya. Keempat, analisis kebijakan luar negeri harus integratif merangkumi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan masuknya berbagai unsur tersebut maka analisis yang dihasilkan akan semakin komprehensif. Pada dasarnya perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan internasional dan politik dalam negeri. Dinamika politik internasional sering memaksa sebuah negara merubah norma dan pola politik tertentu dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kedahulatan negara dalam sistem internasional (Maksum, 2015a, pp. 7-8).

Menurut William D. Coplin didalam buku Pengantar Politik Internasional, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi dibuatnya suatu keputusan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional, yang merupakan posisi khusus suatu negara dalam hubungannya terhadap negara lain di dalam suatu sistem internasional (Coplin & Marbun, 1992, p. 30).

Akan tetapi di dalam penelitian ini kondisi politik dalam negeri merupakan faktor yang dominan dari keterlibatan Turki di dalam krisis Rohingya yang ada di Bangladesh. Hal ini dikarenakan pentingnya peran aktor domestik Turki di dalam pengambilan keputusan luar negerinya. Kondisi politik dalam negeri suatu negara sendiri merupakan salah satu variable penentu di dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan salah satu alat pendukung untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Perumusan dari kebijakan luar negeri sendiri dari negara satu dengan negara lainnya dapat berbeda-beda tergantung dari beberapa aspek dan pertimbangan tertentu yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Termasuk di dalamnya kebijakan domestik suatu negara, sebagaimana di katakan oleh Hudson (2014) bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan kepanjangan dari kebijakan politik domestiknya. Hal ini serupa dengan pendapat Rose (1998) yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu refleksi dari keadaan domestik negara yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, kebijakan domestik suatu negara memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kebijakan luar negerinya. Untuk mengetahui keterkaitan antara politik dalam negeri dan politik internasional, dapat dilihat dari bagaimana politik dalam negeri ini di pengaruhi oleh berbagai aktor, baik yang berasal dari lembaga elit seperti atau bahkan media, organisasi masyarakat, dsb (Mastur, 2015).

Menurut Coplin, di dalam sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) negara manapun bisa dianggap sebagai serangkaian hubungan timbal balik antara para pengambil keputusan dengan para aktornya yaitu *policy influencer*. salah satunya adalah *partisan Influencers* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut. *Partisan Influencers* atau partai yang mempengaruhi bertujuan untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan masyarakat, yaitu suatu tuntutan kepada para

pengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut. Dimana para *influencers* ini mempengaruhi suatu kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan. *Partisan influencers* ini bisa dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran antara para pengambil keputusan resmi dengan anggota masyarakat. Selain itu, *partisan influencers* ini juga berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. (Coplin & Marbun, 1992, p. 84).

*Partisan influencers* juga cenderung memiliki citra yang lebih luas tentang hubungan internasional, jika dibandingkan *influencers* lainnya seperti *bureaucratic influencers* dan *interest influencers*, karena fungsi dari *partisan influencers* sendiri adalah untuk mengagregasikan atau menyalurkan kepentingan dari *influencers* lainnya seperti *mass* dan *interest influencers*.

Dalam penjelasan diatas, konteks keterlibatan Turki dalam kasus krisis pegungsi Rohingya di Bangladesh dipengaruhi pula oleh situasi politik dalam negeri, dimana pasca kemenangan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) atau Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Recep Tayyeb Erdogan, perubahan kebijakan dalam negeri Turki mulai terlihat, dimana demokrasi sudah mulai berkembang dan konstitusi sekuler di Turki tidak sekaku sebelumnya.

Hal ini juga berdampak pada berubahnya, dimana pada periode sebelumnya Turki dikenal dekat dengan kawasan barat namun pasca kemenangan partai AKP, Turki mulai menarik diri secara perlahan. Turki dikenal menggunakan konsep *Strategic Depth* dan *Zero Problem* yang tujuannya untuk memanfaatkan kelebihan Turki secara geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat interaksi Turki dalam dunia internasional tanpa harus mengisolasi diri (Dani, 2017). Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Turki yang memutuskan untuk menolong pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.

## **G. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat diambil suatu hipotesa bahwa Turki Begitu Aktif Dalam Membantu Pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah untuk:

1. Turki membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh karena adanya penindasan HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Etnis Rohingya sering mendapatkan tindak diskriminasi HAM, salah satunya adalah penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh kepada etnis Rohingya. Padahal penolakan terhadap pengungsi adalah pelanggaran terhadap asas *non-refoulement*. Respon turki dalam penindasan HAM yang terjadi pada etnis Rohingya sendiri dapat dilihat desakan Turki agar Bangladesh kembali menerima pengungsi Rohingya dan berbagai macam bantuan kemanusiaan yang diberikan Turki untuk para pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.
2. Turki membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh karena adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki pasca partai AKP berkuasa. *Partisan influencers* merupakan salah satu aktor domestik penting dalam pengambilan keputusan luar negeri di suatu negara. Turki sendiri pasca partai AKP memenangkan pemilu pada tahun 2002, secara perlahan mulai mendekati diri ke negara-negara di Timur dan Asia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam bantuan yang diberikan Turki ke negara-negara tersebut, salah satunya adalah bantuan Turki kepada pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan Turki terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2016-2017 adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara kualitatif dengan analisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi yang dianggap relevan dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian akan di simpulkan. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala alami. Penelitian kualitatif hanya bersifat mendeskripsikan makna atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya (Susilana, 2018).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data yang berdasarkan pada *library research* atau studi pustaka. Studi pustaka adalah proses untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau informasi melalui berbagai macam media kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumentasi, dan hasil penelitian, serta sumber informasi penunjang lainnya, seperti berita media massa, dan penelusuran data online. Dengan metode yang dilakukan, penulis berharap dapat menemukan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu permasalahan digambarkan fakta-fakta yang ada, dimana fakta yang satu dihubungkan dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi langkah pembuatan skripsi, yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II: SEJARAH KONFLIK ROHINGYA**

Pembahasan di bab kedua akan memaparkan mengenai sejarah konflik Rohingya. Dalam bab ini dijelaskan bahwa etnis Rohingya mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi dari pemerintah Myanmar, sehingga mereka memutuskan untuk mengungsi ke Bangladesh. Namun, banyaknya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebabkan Bangladesh menolak etnis Rohingya pada tahun 2016.

### **BAB III: HUBUNGAN TURKI DENGAN BANGLADESH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA**

Pada bab ini dibahas mengenai hubungan bilateral Turki dengan Bangladesh yang merenggang pada tahun 2016, di bab ini juga membahas tentang kebijakan pemerintah Turki dalam membantu pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh, dimana Turki memberikan banyak bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang ada di Bangladesh.

### **BAB IV: KETERLIBATAN TURKI DI DALAM KASUS KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH**

Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari keterlibatan Turki di dalam kasus krisis Rohingya di Bangladesh. Dimana terdapat dua faktor, yaitu respon Turki terhadap penindasan HAM yang terjadi pada etnis Rohingya dan adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki dibawah partai AKP.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Dalam bab ini, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan yang mencakup keseluruhan dari pembahasan yang telah di jelaskan dari bab I hingga bab IV guna menjawab pertanyaan penelitian dari pembahasan yang dipaparkan sebelumnya.

